



## Peran Etika Administrasi Publik Dalam Pelaksanaan Kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Nofriadi Eka Putra<sup>1\*</sup>, Ismi Rahmadani<sup>2</sup>, Ridhatul Khairunnisa<sup>3</sup>, Putri Andalusia<sup>4</sup>, Rahmadona Fitri Helmi<sup>5</sup>, Yulia Hanoselina<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
[nofriadiikaputra000@gmail.com](mailto:nofriadiikaputra000@gmail.com), [smaraismirahmadani@gmail.com](mailto:smaraismirahmadani@gmail.com), [ridhatulkhairunnisa@gmail.com](mailto:ridhatulkhairunnisa@gmail.com),  
[pw31005658@gmail.com](mailto:pw31005658@gmail.com), [rahmadhonafh@fis.unp.ac.id](mailto:rahmadhonafh@fis.unp.ac.id), [Yuliahanoselina@fis.unp.ac.id](mailto:Yuliahanoselina@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

This research aims to analyze public administration ethics in the implementation of work at the West Sumatra Province Social Service. Public administration ethics is an important aspect that influences the quality of public services and public trust in the government. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that there are several challenges in implementing public administration ethics, such as a lack of employee understanding of the code of ethics, low transparency in decision making, and the practice of nepotism. However, there are also efforts made by the Social Service to improve work ethics, such as ethics training for employees and implementing a monitoring system. This research recommends the need to increase ethical awareness among employees and strengthen monitoring mechanisms to create a more ethical and transparent work environment.

**Kata Kunci:** *Public administration ethics, Social Services, public services, transparency, code of ethics, West Sumatra.*

### PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan bagian penting dalam penerapan good governance, khususnya pada lembaga publik yang fokus pada pelayanan sosial. Harbani Pasolong (2010): Administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik juga diartikan sebagai proses di mana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, meliputi penyuluhan, bantuan sosial, dan manajemen kasus sosial.

Dalam konteks ini, praktik administrasi publik memainkan peranan penting dalam menjamin kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga dalam hal keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, banyak permasalahan etika dalam administrasi publik, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dinas Sosial, salah satu lembaga yang mengelola langsung bantuan sosial dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kerja adalah proses menerapkan rencana atau kebijakan yang telah disusun dengan cermat. Menurut G.R. Terry, pelaksanaan mencakup kegiatan seperti menentukan tujuan, mengelompokkan tugas, dan penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik. Pelaksanaan tidak hanya sekadar aktivitas, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang dan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kerja di dinas ini:

#### **Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

1. Perumusan Kebijakan: Menyusun kebijakan teknis di bidang sosial yang mendukung program kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberian Dukungan: Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang sosial.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas: Melaksanakan pembinaan kepada lembaga sosial dan pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

### **Tujuan Pelaksanaan Kerja**

Tujuan dari pelaksanaan kerja Dinas Sosial mencakup:

1. Mengembangkan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menangani permasalahan sosial.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial: Mengembangkan alternatif intervensi untuk meningkatkan kemampuan pekerja sosial dan masyarakat.
3. Perlindungan Masyarakat: Melindungi masyarakat dari dampak negatif masalah sosial seperti kemiskinan dan kekerasan.

### **Proses Pelaksanaan Kerja**

Pelaksanaan kerja di Dinas Sosial dilakukan melalui beberapa langkah kunci:

1. Penyusunan Rencana Kerja: Setiap tahun, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan.
2. Rapat Koordinasi: Secara berkala, Dinas Sosial mengadakan rapat koordinasi untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas program, seperti Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang melibatkan berbagai pihak terkait.
3. Pelaksanaan Program: Implementasi program-program kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilakukan secara terintegrasi untuk menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

### **Kegiatan Utama**

Beberapa kegiatan utama dalam pelaksanaan kerja Dinas Sosial meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan kelompok rentan agar dapat berfungsi secara produktif dalam masyarakat.
2. Pelayanan Sosial: Menyediakan layanan bagi anak-anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang cacat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
3. Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial: Memastikan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi sosial masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam program bantuan sosial.

### **Evaluasi dan Pengawasan**

Dinas Sosial juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa target-target yang ditetapkan tercapai. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan hasil dari setiap program yang dilaksanakan.

## **METODE**

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, alat pengumpulan data akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, alat dan metode pengumpulan data harus dikembangkan secara hati-hati. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. Tujuan wawancara adalah untuk memahami bagaimana penerapan praktik manajemen pada pelayanan sosial di negara bagian Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada seseorang yang bekerja sebagai kepala bagian pelayanan umum dan umum pada dinas sosial di provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Etika administrasi publik berfokus pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang mengatur pelayanan publik, terutama dalam tugas rehabilitasi sosial di panti-panti yang bernaung di bawah Dinas Sosial. Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada panti sosial milik pemerintah, tetapi juga mencakup panti sosial milik masyarakat atau swasta.

Selain itu, disebutkan pula bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab atas beberapa jenis pemerlu pelayanan kesehatan sosial, termasuk penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dan wanita tunasusila. Pelayanan ini harus dijalankan sesuai dengan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Raya.

### PEMBAHASAN

Penerapan etika administrasi publik di Dinas Sosial, terutama dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak-anak terlantar, dan wanita tunasusila. Penerapan etika ini dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah. Artikel ini juga menguraikan bahwa Dinas Sosial memberikan dua jenis pelayanan utama, yaitu pelayanan terhadap orang terlantar (kalantar) dan distribusi logistik bencana alam. Pelayanan terhadap orang terlantar melibatkan penanganan dan pemulangan mereka ke daerah asalnya, sementara distribusi logistik difokuskan pada bantuan saat terjadi bencana.

Selain itu, artikel ini membahas pentingnya SOP dalam menjaga agar setiap pegawai menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat. Pelatihan dan peningkatan kapasitas juga diadakan secara rutin untuk memastikan pegawai Dinas Sosial terus memahami aturan terbaru dan bisa memberikan pelayanan yang optimal. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah perubahan budaya kerja yang lambat, terutama karena banyak pegawai yang masih terbiasa dengan cara kerja lama dan sulit beradaptasi dengan regulasi baru.

Pengawasan dan penegakan disiplin juga merupakan bagian penting dari etika administrasi publik di Dinas Sosial. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai, dan kepatuhan terhadap kode etik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga sangat ditekankan, dengan pegawai dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas, baik dalam hal keuangan maupun dalam pengambilan keputusan pelayanan. Artikel ini secara keseluruhan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana etika administrasi publik dijalankan di Dinas Sosial, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

### KESIMPULAN

Menekankan pentingnya etika administrasi publik dalam menjaga kualitas pelayanan di Dinas Sosial. Etika administrasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas, tetapi juga memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pelaksanaan etika yang baik sangat bergantung pada kepatuhan pegawai terhadap aturan dan kemauan untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan evaluasi.

Menyoroti tantangan besar dalam mengubah budaya kerja yang telah lama terbentuk di lingkungan birokrasi. Tantangan tersebut meliputi upaya untuk mengubah mindset pegawai agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan tuntutan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penerapan etika administrasi publik yang baik memerlukan komitmen dari seluruh elemen dalam organisasi, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia. *Co-Value:Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan*, 856-865.
- Batubara, & Nasution. (2023). Sistem Informasi Online Pengelolaan Dana Sosial Pada Rumah Yatim Sumatera Utara. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 164-171.
- Bartens, K. (2021). Etika. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik Di Indonesia. *Journal of governance innovation*, 59-76.
- Budiman, Farhanuddin, A. F., Setia, A. A., & Jauza, D. (2021). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika:Jurnal Ilmu Sosial*, 64-74.
- Choirulsyah, D., & Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governancedi Indonesia. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 195-203.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. *PAR Public Administration Review*, 1-9.
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 259–268.
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan J. Hum. Soc. Sci*, 1–8.
- Nkyabonaki, J. (2019). Effectiveness of the Public Service Code of Ethics in Controlling Corrupt Behaviour in The Public Service: Opinion from the Grassroots at Toangoma Ward-Temeke Municipal Council. *Journal of Asian and African Studies*, 1195–1212.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rafdi, H., Wasistiono, S., & Meltarini. (2023). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3884–3898.
- Rahim, A., Hadawiah, & Idris. (2023). Komunikasi Pemerintah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internal Marga Lewo Muda Di Desa Kolipetung Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur. *RESPON: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 72-81.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, & Aiman. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 685-697.
- Sulistiyowati, F., Tyas, Dibyorini, & Puspitosari. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggungharjo DIY (Utilization of Sistem Informasi Desa (SID) to Realize Smart Village in Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta). *JURNAL IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 213 - 226 .
- Sanadi, P. Y. F., Fatmawada, S., & Djunaedi, D. (2024). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 55-71.
- Suri, H. M., & Kismartini, K. (2017). Implementasi Kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 231-248.
- Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.

UNDP. (1997). *Management Development and Governance Division Bureau for Policy and Programme Support United Nations Development Programme United Nations Development Programme*. Newyork: Good Governance Principles.